

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR: 08.../XIII/A/UNAND-2015
TENTANG
KEBIJAKAN MUTU KURIKULUM

Menimbang:

- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa sesuai dengan arah pengembangan Universitas Andalas yaitu menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, mempunyai spirit kewirausahaan dan berkarakter;
- c. bahwa kurikulum program studi perlu dikembangkan secara berkelanjutan sesuai dengan visi institusi dan kebutuhan masyarakat;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c maka perlu ditetapkan kebijakan pengembangan kurikulum dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi Luar Domisili Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;

18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian Di Perguruan Tinggi;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan Tinggi;
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
23. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 218 Tahun 2013 tentang Kebijakan Mutu Internal Universitas Andalas Tahun 2013-2017.

Memperhatikan:

1. Visi, misi, tujuan dan rencana arah pengembangan Universitas Andalas.
2. Rencana Strategis Bisnis Universitas Andalas Tahun 2014-2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN EVALUASI KURIKULUM

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (2) Universitas Andalas yang selanjutnya disebut UNAND adalah perguruan tinggi pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, serta pendidikan profesi.
- (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disingkat SNPT adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKN I, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang

- pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (6) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
 - (7) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 - (8) Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan program studi di dalam masyarakat/dunia kerja.
 - (9) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
 - (10) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
 - (11) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - (12) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
 - (13) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN ARAH PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Visi UNAND:

Menjadi Universitas terkemuka dan bermartabat.

Pasal 3

Misi Pendidikan UNAND

Menyelenggarakan pendidikan yang terkemuka dan berkesinambungan;

Pasal 4

Tujuan Pendidikan UNAND:

Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan akademik dan/atau profesional serta berdaya saing yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni (IPTEKS).

Pasal 5

Arah Pengembangan Pendidikan UNAND

- 1) Menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, mempunyai spirit kewirausahaan dan berkarakter Andalasian.
- 2) Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses oleh masyarakat.

- 3) Meningkatkan mutu pelayanan melalui penyediaan fasilitas, prasarana, sarana dan teknologi sesuai dengan standar yang ditetapkan secara nasional dan internasional serta mewujudkan suasana akademik yang kondusif serta bermanfaat bagi masyarakat.
- 4) Memperluas dan meningkatkan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga pemerintah/swasta di dalam dan luar negeri.

Pasal 6

Target Capaian Pendidikan UNAND

Target capaian pendidikan yaitu menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing global, mempunyai spirit kewirausahaan dan berkarakter.

BAB III

PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 7

Dasar Pengembangan Kurikulum

- 1) Pengembangan kurikulum didasarkan pada pendekatan capaian pembelajaran.
- 2) Kebijakan pengembangan kurikulum menjadi dasar perumusan kurikulumprogram studi.
- 3) Setiap pernyataan dalam standar pengembangan kurikulum harus diimplementasikan di semua program studi di lingkungan UNAND.
- 4) Capaian standar pengembangan kurikulum di semua program studi harus dimonitoring dan dievaluasi sebagai dasar perbaikan mutu berkelanjutan.

Pasal 8

Organisasi Pengelola Pengembangan Kurikulum

- 1) Penanggungjawab pengembangan dan evaluasi kurikulum melekat ke organisasi universitas.
- 2) Di tingkat universitas adalah rektor, komisi I bidang pendidikan, kemahasiswaan dan penjaminan mutu senat akademik universitas, wakil rektor bidang akademik, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M), dan Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK).
- 3) Di tingkat fakultas/pascasarjana adalah dekan/direktur, senat fakultas, wakil dekan/wakil direktur bidang akademik dan Badan Penjaminan Mutu (BAPEM)/Pusat Penjaminan Mutu.
- 4) Di tingkat jurusan/bagian/program studi adalah Ketua jurusan/bagian/program studi, koordinator program studi S2/S3 dan Gugus Kendali Mutu (GKM).

Pasal 9

Pelaksana Pengembangan Kurikulum

- 1) Kebijakan pengembangan kurikulum, standar pengembangan kurikulum, pedoman penyusunan dan evaluasi kurikulum dirumuskan oleh LP3M.
- 2) Rumusan kebijakan dan standar pengembangan kurikulum dibahas dan disetujui oleh Komisi I Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan Penjaminan Mutu Senat Akademik Universitas.
- 3) Kebijakan dan standar pengembangan kurikulum ditetapkan oleh rektor.
- 4) Kurikulum program studi disusun/direvisi oleh tim (*ad hoc*) kurikulum.
- 5) Usulan kurikulum program studi disetujui oleh dekan atas pertimbangan senat fakultas.
- 6) Kurikulum program studi ditetapkan oleh rektor.

- 7) Implementasi kurikulum dilaksanakan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan dan wakil dekan/wakil direktur bidang akademik, dan Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi.

BAB IV IMPLEMENTASI KURIKULUM

Pasal 10 Ruang Lingkup Kurikulum

Ruang lingkup kurikulum mencakup capaian pembelajaran, bahan kajian, proses pembelajaran, dan penilaian pembelajaran.

Pasal 11 Capaian Pembelajaran

- 1) Capaian pembelajaran merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
- 2) Capaian pembelajaran lulusan mencakup unsur sikap dan tatanilai, pengetahuan, dan keterampilan.
 - a) unsur sikap dan tatanilai telah ditetapkan oleh KKNi dan dikembangkan oleh UNAND sesuai dengan nilai-nilai unggul dan kearifan lokal;
 - b) unsur pengetahuan dirumuskan berdasarkan deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNi;
 - c) unsur keterampilan atau kemampuan kerja dibagi atas dua macam yaitu kemampuan kerja umum dan khusus.
- 3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib:
 - a) mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi; dan
 - b) memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi
- 4) Capaian pembelajaran dirumuskan berdasarkan profil lulusan suatu program studi.

Pasal 12 Bahan Kajian

- 1) Bahan kajian merupakan isi pembelajaran yang mencakup tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi untuk setiap program pendidikan.
- 2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi.
- 3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah atau blok.

Pasal 13 Proses Pembelajaran

- 1) Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah atau blok dan disajikan dalam bentuk silabus dan rencana pembelajaran semester (RPS) atau Rencana Pembelajaran Blok (RPB).
- 2) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif untuk pemenuhan capaian pembelajaran.

Pasal 14
Penilaian Pembelajaran

- 1) Penilaian pembelajaran mencakup penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Pelaksanaan penilaian untuk program spesialis dua dan program doktor wajib menyertakan penilai eksternal dari perguruan tinggi lain atau institusi riset.

BAB V
KUALIFIKASI LULUSAN

Pasal 15
Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Disamping Ijazah dan Transkrip Akademik, kepada lulusan diberikan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

BAB VI
EVALUASI KURIKULUM

Pasal 16

Evaluasi kurikulum dilaksanakan secara terintegrasi, terstruktur, dan rutin untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

BAB VII
ASAS PENYELENGGARAAN

Pasal 17

Pengembangan dan implementasi kurikulum serta umpan baliknya merupakan prinsip utama yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pendidikan yang berasaskan akuntabilitas, transparansi, kualitas, kebersamaan, keadilan, hukum, manfaat, kesamaan, kemandirian, dan disiplin.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 18

- 1) Segala sesuatu dalam Kebijakan Pengembangan Kurikulum ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan tersendiri dalam bentuk Standar Pengembangan Kurikulum.
- 2) Untuk kelancaran pengembangan kurikulum program studi akan disediakan Pedoman Penyusunan Kurikulum Program Studi.
- 3) Kebijakan dan Standar serta Pedoman Pengembangan Kurikulum perlu disosialisasikan kepada semua pihak terkait.
- 4) Implementasi Kebijakan dan pencapaian Standar Pengembangan Kurikulum perlu dipantau dan dievaluasi secara periodik oleh LP3M, BAPEM dan GKM.
- 5) Untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian butir-butir mutu dalam Standar Pengembangan Kurikulum perlu dirumuskan Instrumen Audit Mutu Kurikulum.

- 6) Peraturan Akademik D3/S1/S2/S3/Profesi/Specialis mengacu pada Kebijakan dan Standar Pengembangan Kurikulum.
- 7) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 16 November 2015

Rektor,

Prof. Dr. Werry Darta Taifur, SE, MA
NIP. 196011291986031003